

Kemenhut Keluarkan 21 Izin Geotermal

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) baru saja mengeluarkan 21 izin pemanfaatan sumber panas bumi atau geotermal. Pengurusan ke 21 izin itu tidak ada yang melebihi waktu tiga bulan. "Kemarin 21 izin bagi geotermal baru saja kami keluarkan," kata Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan di DPD, Selasa (11/10).

Menurut Zulkifli sejak payung hukum pemanfaatan energi panas bumi tersebut disahkan, pihaknya berusaha maksimal mendorong sektor industri memanfaatkan hal tersebut. Padahal sebelum ini, lanjut Zulkifli, pengurusan izin memakan waktu sekitar satu tahun. "Sejak payung hukumnya keluar, tidak ada yang lebih dari waktu itu," kata Zulkifli melanjutkan.

Dengan semakin mudahnya pengurusan izin tersebut, Zulkifli berharap sejumlah perusahaan yang sebelumnya menggunakan bahan bakar seperti kayu, maupun batu bara sebagai bahan bakar akan segera beralih. Sebab, penggunaan kedua jenis bahan bakar itu diyakini akan semakin merusak alam terutama hutan. "Penggunaan geotermal menjadi prioritas," katanya.

Sejalan dengan program penyelamatan hutan, Zulkifli meminta semua pihak yang terkait memiliki komitmen yang jelas dan pasti. Tidak terkecuali para legislator yang bertugas membuat Undang-Undang (UU). "Sudah saatnya kami punya *frame work* legislasi yang mendukung," katanya.

Begitu juga terkait produk karbon yang banyak dimiliki negeri ini legislatif diharapkan mampu menghasilkan produk perundangan yang bisa dijadikan payung hukum bagi produk karbon tersebut. "Indonesia harus punya legislasi agar produk karbon Indonesia bisa diterima dunia. Sejumlah aturan memang mempersulit Indonesia," kata Zulkifli.

Setiap izin pemanfaatan hutan yang dikeluarkan pihaknya, sudah melewati prosedur dan dipastikan tidak akan membuat kerusakan hutan. Industri pengolahan kayu yang izinnya dikeluarkan saat ini sudah menggunakan 70 persen hasil hutan tanaman industri.

"Kemenhut mengembangkan industri kayu berbasis hutan tanaman. Jumlahnya 70 persen. Yang menggunakan hasil hutan alam akhir 2014 hanya 15 persen karena sisa izin lama. Kami menggalakkan penanaman besar-besaran yang didukung dengan penyediaan bibit bagi masyarakat," katanya.

Zulkifli menambahkan sedang berusaha menyejahterakan masyarakat yang hidup pada sekitar kawasan hutan. Sebab, dengan meningkatkan kesejahteraan mereka, keselamatan dan kelestarian hutan akan lebih dapat terjaga.

"Semua hutan akan baik kalau masyarakat sekitar hutan sejahtera. Walau konsesi dihentikan, kenaikan harga komoditas menarik minat penduduk untuk masuk hutan. Selama ini segala macam izin selalu untuk perusahaan, sementara masyarakat tidak. Kemenhut kembangkan hutan tanaman rakyat. Hanya saja tidak